

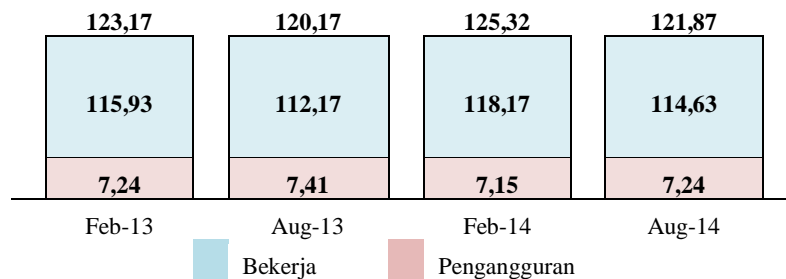
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi kejadian besar yaitu globalisasi yang mulai menerobos Indonesia dan krisis ekonomi, karena itu tidak heran jika banyak pengangguran di Indonesia. “Menurut ketua komite tetap sertifikasi tenaga kerja kamar dagang dan industry (KADIN), Sumarna F Abdurrahman mengatakan gap terjadi lantaran suplai tenaga kerja yang disediakan lembaga pendidikan tidak sepenuhnya terserap oleh pelaku industri”.⁸ Pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkatpun tidak dapat menyerap angkatan kerja untuk masuk ke dalam pasar kerja. Menurut Badan Pusat Statistik data ketenagakerjaan untuk struktur angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut⁹ :

Gambar I.1
Struktur Angkatan Kerja (Juta Orang)



* Agustus 2014 ada 121,9 juta angkatan kerja

* 7,2 juta orang masih menganggur (belum tertampung oleh pasar kerja)

Sumber : BPS (2014)

⁸ <http://www.merdeka.com/uang/jumlah-tenaga-kerja-tak-sebanding-dengan-lapangan-pekerjaan>. Diakses pada 11 Juni 2014 jam 14:58

⁹ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150505150630-78-51318/ekonomi-melambat,-pengangguran-Indonesia-bertambah>. Diakses pada 26 Januari 2016 jam 14:01

Tabel I.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Per Februari 2014

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jumlah	Persentase
Tidak/belum pernah sekolah	134.040 juta jiwa	1,88
Belum/tidak tamat SD	610.574 juta jiwa	8,54
SD ke bawah	1.374.822 juta jiwa	19,24
Sekolah Menengah Pertama	1.693.203 juta jiwa	23,69
Sekolah Menengah Atas	1.893.509 juta jiwa	26,49
Sekolah Menengah Kejuruan	847.365 juta jiwa	11,86
Diploma I/II/III	195.258 juta jiwa	2,73
Universitas	398.298 juta jiwa	5,57
Total	7.147.069 juta jiwa	100

Sumber : Data BPS (2015)

Tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan tingkat kesejahteraan menurun. Hal ini menyebabkan minat seseorang untuk berwirausaha kurang sebab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi karena tidak adanya pendapatan. Akibat terburuknya yaitu kemiskinan yang menimpa sebagian besar masyarakat. “Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebagai berikut :”¹⁰

Tabel I.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2012	1,51 juta jiwa
2013	1,57 juta jiwa

Sumber : BPS kab. Bekasi (2013)

¹⁰ <http://www.megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/04/21/Kawasan> industri bertambah Rakyat Bekasi Tetap Miskin. Diakses pada 27 Januari 2016 jam 17:59

“Kepala dinas sosial kabupaten Bekasi Sutisna menjelaskan sampai tahun 2014, angka kemiskinan khususnya pada kecamatan di kabupaten Bekasi masih tinggi. Data Dinkes Pemkab Bekasi menunjukkan bertambahnya 450 ribu jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).”¹¹

Masalah status ketenagakerjaan juga menjadi isu nasional yang tidak lagi dapat dielakkan. “Status kerja kini menjadi kabur sejak ditetapkannya Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Khususnya tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan *outsourcing*”.¹² Sejak undang-undang tersebut diberlakukan, status pekerja di berbagai perusahaan industri semakin tidak jelas. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik status penduduk yang bekerja, yaitu :¹³

Tabel 1.3

Data ketenagakerjaan (Juta Orang)

Penduduk yang bekerja	2013		2014		
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	
				Jumlah	Persen
Pekerja tidak penuh	36,39	37,74	36,97	35,77	31,20
Setengah penganggur	13,68	11,00	10,57	9,68	8,44
Pekerja paruh waktu	22,71	26,74	26,40	26,09	22,76
Pekerja penuh	79,54	75,02	81,20	78,86	68,80
Total	115,93	112,76	118,17	114,63	100

Sumber : BPS (2013,2014)

¹¹ <http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/26/5/219057/Tiga-Tahun-Target-Pemkab-Bekasi-Berantas-Kemiskinan>. Diakses pada 15 Agustus 2014 jam 13:43

¹² <http://fsplem-bekasi.or.id/about/artikel/51/detail/keadilan-pemerintah>. Diakses pada 3 Juli 2014 jam 08:58

¹³ <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 26 Januari 2016 jam 14:15

Status karyawan lebih banyak menjadi pekerja kontrak yang setiap waktu dapat di PHK. Adanya sistem kontrak dan *outsourcing* ini membuat posisi tawar menawar pekerja semakin lemah karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pesangon jika di PHK dan tunjangan-tunjangan lain. Karenanya tak heran, ketika krisis ekonomi global melanda banyak pekerja yang di PHK tanpa mendapatkan uang pesangon. “Menurut Data Kementerian Tenaga Kerja jumlah PHK, sebagai berikut.”¹⁴

Tabel I.4

Data PHK Per September 2015

Propinsi		Jumlah	Keterangan
DKI Jakarta		1.546 orang	Pengurangan karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (kontrak)
Jawa Barat		7.779 orang	
Kabupaten Bekasi	2.197		
Kabupaten Bogor	737		
Kabupaten Karawang	283		
Kabupaten Bandung	4.562		
Banten		7.294 orang	
Jawa Tengah		3.370 orang	
Jawa Timur		5.630 orang	
Total		25.619 orang	

Sumber : Kementerian Tenaga Kerja (2015)

¹⁴ <http://foruminvestorbekasi.com/Data Resmi PHK Kemnaker, Bekasi Duduki Posisi 4 Terbanyak. Diakses pada 30 Januari 2016 jam 16:10>

Selain itu permasalahan yang timbul berkaitan dengan upah yang di terima tenaga kerja khususnya pegawai tetap masih banyak dibawah rata-rata upah minimum yang telah ditetapkan. Upah yang diterima pegawai tetap saja masih dibawah rata-rata, apalagi bagi pekerja lepas. Pekerja dengan upah rendah cenderung merupakan kelompok pekerja perempuan dengan jumlah yang sangat tinggi.

Hal ini menunjukkan semakin tingginya perempuan yang beralih dari pekerja keluarga yang tidak dibayar menjadi pekerja kontrak. Dalam sejumlah kondisi upah kerja yang rendah dapat menjadi batu loncatan kepada pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Namun bagi banyak pekerja bekerja dengan upah rendah merupakan sesuatu yang harus mereka lakukan dan bukan merupakan pekerjaan sementara. “Menurut Data Badan Pusat statistik mengenai upah yang diterima tenaga kerja, sebagai berikut :”¹⁵

Tabel I.5
Tingkat Pekerja Berupah Rendah (Juta Orang)
Low Pay Rate-LPR

Jenis Kelamin/Daerah	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	27.32	28.14	28.37	30.39
Perempuan	34.85	34.49	36.15	32.35
Perkotaan	29.10	28.63	30.11	32.21
Perdesaan	31.27	30.33	29.68	29.75

Sumber : BPS (2011-2014)

¹⁵ <http://www.ilo.org>. Diakses pada 3 Februari 2016 jam 17:04

Tabel I.6
Upah Tenaga Kerja (Rupiah)

Variabel	2014
Upah bersih rata-rata karyawan	1.952.589
Upah minimum rata-rata nasional	1.494.134
Karyawan dengan upah rendah	950.000

Sumber : BPS Keadaan Angkatan Kerja (2014)

Dengan tidak adanya kepastian dalam bekerja tentunya dapat mengubah cara pandang, cara berpikir dan cara berbuat orang Indonesia terhadap sumber daya manusia yang diperlukan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Lingkungan mempunyai peranan yang penting bagi seseorang dalam memilih pekerjaan terutama lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Untuk itu lingkungan keluarga terutama orang tua berperan langsung dalam mempersiapkan mental dan potensi anak-anak mereka, dalam membentuk kepribadian yang kuat.

“Mempersiapkan manusia berwirausaha dapat diibaratkan sebagai pekerjaan membangun sebuah rumah. Supaya bangunan kokoh dan tahan lama diperlukan pondasi yang kuat, peranan orang tua dan keluarga didalamnya adalah peletak dasar bagi perkembangan pribadi anak di masa-masa selanjutnya”.¹⁶

Latar belakang keluarga yang bukan dari keluarga wirausaha kurang mendapat dorongan untuk berwirausaha dari keluarganya. Persepsi mereka bahwa menjadi pekerja lebih menghasilkan dibandingkan jika menjadi wirausaha, hal tersebut bisa mengubah minat seseorang yang berkeinginan menjadi wirausaha.

¹⁶ Wasty Soemanto, *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), p.95

Pandangan semacam ini banyak dianut oleh masyarakat kita, sehingga mereka tidak tertarik untuk berwirausaha. Banyak orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya menekuni bidang ini, dan berusaha mengalihkan perhatian anak mereka untuk menjadi pegawai negeri dikarenakan pekerjaan tersebut lebih bergengsi dibandingkan menjadi seorang wirausaha.

“Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha, antara lain sifat agresif, bersaing, egois, tidak jujur, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat dan pekerjaan rendah”.¹⁷ Padahal dengan berwirausaha secara tidak langsung menjadi jalan keluar dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

Berbeda dengan seorang dari latar belakang wirausaha, secara tidak langsung terbiasa dengan lingkungan wirausaha sehingga terdorong untuk berwirausaha, yang tertanam di pikiran bahwa dengan berwirausaha akan mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik.

Dalam proses pembangunan ekonomi suatu bangsa, pendidikan mempunyai peran penting yang diharapkan mampu menembus bidang kerja baru. Bagaimana tidak, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. “Salah satu upaya pemerintah meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa melalui pemberdayaan masyarakat menjadi wirausaha”.¹⁸ Karena wirausaha merupakan

¹⁷ Buchari Alma, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Alfabeta, 2009), p.2

¹⁸ [http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/23/umkm-primadona-perekonomian-Indonesia-di-masa-datang-505408//diakses pada 4 Maret 2013 jam 08:53](http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/23/umkm-primadona-perekonomian-Indonesia-di-masa-datang-505408//diakses%20pada%204%20Maret%202013%20jam%2008:53)

kunci dari pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan pekerjaan dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Dengan demikian sudah waktunya dunia wirausaha diperkenalkan sejak dini. “Sistem pendidikan di Indonesia kurang sukses menanamkan kesadaran berwirausaha. Dampaknya masih kecilnya minat lulusan lembaga pendidikan menjadi wirausaha. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan minat berwirausaha para lulusan lembaga pendidikan rendah. Untuk lulusan SMA yang ingin berwirausaha sebesar 22,63%, lulusan SMK yang ingin berwirausaha 15,6% dan lulusan sarjana yang ingin berwirausaha hanya 6,14%.”¹⁹ Selebihnya ingin menjadi karyawan, menurut mereka penghasilan yang di dapat sudah pasti diperoleh sedangkan berwirausaha belum jelas pendapatan yang akan diperoleh hal ini menjadi salah satu penyebab masih rendahnya minat berwirausaha.

“Wakil Rektor Universitas Indonesia Bambang Wibawarta mengatakan tidak ada di sistem pendidikan kita untuk menanamkan sifat berwirausaha sejak dini di SD, SMP, SMA/SMK/MA jadi ini masih minim. Kurikulum 2013 yang dirancang oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan , tak juga memasukkan materi kewirausahaan secara terpadu di berbagai tingkat pendidikan. Wirausaha itu harus dibangun melalui budaya kita hal itu kemudian didampingi dengan ilmu pengetahuan, sayangnya kurikulum 2013 yang baru masih belum jelas”.²⁰

Akibat dari minimnya kesadaran berwirausaha, lulusan sekolah di negara ini kurang bermental baja dalam pekerjaan. Berdasarkan data keseluruhan jumlah

¹⁹ <http://jabartoday.com/ekonomi/2013/11/23/minat-berwirausaha-orang-indonesia-masih-rendah>. Diakses pada 26 Januari 2016 jam 14:50

²⁰ <http://id.berita.yahoo.com/sistem-pendidikan-biang-kerok-indonesia-minim-wirausaha>. Diakses pada 21 Juli 2014 jam 16:56

wirausahawan di Indonesia tercatat hingga Februari 2014 ada 44,2 juta orang yang berusaha membuka lapangan kerja secara berdikari. Sementara, total penduduk bekerja di republik ini mencapai 118,1 juta orang.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi harus dicari pemecahannya. Karena itu kemampuan memecahkan masalah harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat mencari solusi mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, mulai masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks. Ketika sebuah keinginan tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, maka timbul masalah. Dengan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah akan menghasilkan sebuah keputusan, yang diharapkan memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kemampuan Memecahkan Masalah Terhadap Minat Berwirausaha”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha sebagai berikut :

1. Pendapatan yang masih rendah.
2. Minimnya dorongan dari keluarga.
3. Status pekerjaan yang tidak jelas.
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan. .
5. Minimnya menekuni wirausaha dan berkeinginan menjadi pegawai.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai macam masalah yang dipaparkan di atas ternyata minat berwirausaha dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu permasalahan dibatasi hanya pada masalah : Hubungan kemampuan memecahkan masalah terhadap minat berwirausaha. Kemampuan memecahkan masalah dilihat berdasarkan kemampuan konseptual yaitu memahami permasalahan dan kemampuan pengambilan keputusan meliputi rajin mengumpulkan informasi, kreatif mencari pemecahan masalah, berani mengambil keputusan sedangkan minat berwirausaha dilihat berdasarkan faktor pribadi yaitu keyakinan memulai usaha, berani mengambil resiko. Faktor sosiologi yaitu dorongan keluarga dan faktor lingkungan meliputi ketertarikan adanya peluang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah terdapat hubungan kemampuan memecahkan masalah terhadap minat berwirausaha pada siswa ?”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan ketrampilan dalam memecahkan masalah dan menumbuhkan minat berwirausaha bagi peneliti.
2. Untuk menjadi bahan pengetahuan tambahan bagi program studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.

3. Sebagai tambahan referensi informasi dan wawasan ilmu pengetahuan, dan dapat di baca oleh kalangan akademika kampus di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
4. Sebagai bahan pemikiran dan informasi mahasiswa untuk memungkinkan adanya penelitian lanjutan mengenai hubungan kemampuan memecahkan masalah terhadap minat berwirausaha.